

Kapolri Terbitkan Telegram Terkait Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Jawa-Bali

JAKARTA (IM) - Kapolri Jenderal Idham Azis menerbitkan telegram yang memerintahkan seluruh jajaran di bawahnya agar menindaklanjuti kebijakan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di pulau Jawa dan Bali, yang akan diberlakukan mulai 11 – 25 Januari 2021..

Telegram itu bernomor ST/13/1/OPS.2./2021 per tanggal 7 Januari 2021 dan ditandatangani oleh Kabaharkam Polri Komjen Agus Andrianto.

Dalam telegram itu, menjelaskan bahwa perintah ditujukan kepada para Kapolda di seluruh Indonesia agar mengaktifkan protokol kesehatan Covid-19.

"Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Pemda, TNI, dan stakeholder lainnya untuk melaksanakan pengetatan pengawasan dan penerapan protokol kesehatan dengan meningkatkan pelaksanaan Operasi Yustisi," kata Agus dalam keterangan resmi, Jumat (8/1).

Kapolri juga meminta agar jajarannya berkoordinasi dan membangun komunikasi dengan pihak Kepala Daerah untuk mengatur secara spesifik aturan-aturan hingga penerapan sanksi PPKM dalam Peraturan Daerah (Perda).

Agus menjabarkan, bahwa kegiatan Satgas II Operasi Aman Nusa II juga akan ditingkatkan guna memberikan sosialisasi

terkait penyebaran Covid-19 selama ini. Termasuk, kata dia, memberikan edukasi guna membangun kesadaran masyarakat terkait virus ini.

"Melakukan pengawalan dan pengawasan serta mendorong pihak Pemda untuk mengakselerasi pelaksanaan belanja barang maupun modal, penyaluran seluruh program bantuan sosial pemerintah serta memberikan kemudahan investasi dan kegiatan usaha terutama pada triwulan I tahun 2021 dalam rangka mendukung program pemulihan perekonomian nasional," ujar Agus.

Agus meminta agar jajaran Kapolda mempelajari dan memahami serta mengikuti perkembangan rencana proses vaksinasi Covid-19 yang dicanangkan oleh pemerintah pusat lewat Kementerian Kesehatan.

"Surat Telegram ini bersifat perintah untuk dilaksanakan," ucap Agus.

Sebagai informasi, penerapan PPKM di wilayah Jawa-Bali akan mulai diberlakukan sejak 11-25 Januari 2021.

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto menegaskan kebijakan PPKM bukanlah karantina wilayah atau lockdown. Melainkan hanya pembatasan mobilitas warga yang diperketat, katanya. • Ius



IDN/ANTARA

BNN GELAR RILIS KASUS DAN GELAR PEMUSNAHAN BARANG BUKTI

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Petrus Reinhard Golose (kedua kiri) dan Deputy Bidang Pemberantasan BNN Irjen Pol Arman Depari (kedua kanan) memberikan keterangan pada media saat gelar rilis kasus narkoba di Kampung Ambon dan gelar pemusnahan barang bukti narkoba di Kantor BNN, Jakarta, Jumat (8/1). BNN berhasil mengamankan barang bukti sabu seberat 5,8 kilogram, 248 butir pil ekstasi dan 15,22 kilogram ganja serta menahan lima orang tersangka jaringan narkoba di Kampung Ambon, BNN juga menggelar pemusnahan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 73,76 kilogram dan 9.980 butir pil ekstasi yang disita dari tiga kasus narkoba di Riau, Batam Kepri, dan Sumatra Utara.

Kapolda Metro Jaya Perintahkan Para Kapolres Bikin Kampung Tangguh

Sesuai perintah Kapolda Metro, Irjen Pol Fadil Imran, Polres Jaksel telah membentuk 10 Kampung Tangguh untuk membantu penanggulangan penyebaran Covid-19 di wilayah yang masuk zona merah.

JAKARTA (IM) - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran memerintahkan para kapolres yang masuk dalam wilayah hukumnya, untuk membuat Kampung Tangguh dalam waktu dekat di 55 RW wilayah zona merah Covid-19. Perintah tersebut disampaikan demi mendukung kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat untuk pengendalian penyebaran Covid-19 yang akan dilakukan serentak di Jawa dan Bali pada 11 hingga 25 Januari 2021.

"Tadi Kapolda baru saja memerintahkan semua Kapolres. Kami rapat, Kapolres sejawaran Polda Metro Jaya. Dikasih waktu 55 RW (zona merah) itu hari Senin sudah berdiri Kampung Tangguh Jaya di situ," ujar Kabid Humas

Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus, Jumat (8/1).

Yusri tak menyebutkan secara rinci 55 RW wilayah zona merah Covid-19, yang akan dibangun Kampung Tangguh. Namun, fungsi Kampung Tangguh itu untuk mengawasi segala bentuk aktivitas masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan guna menekan penyebaran Covid-19.

"Upaya dari Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya nanti dimulai dari tingkat bawah untuk bisa menekan penyebaran Covid-19 yang ada," kata Yusri.

Selain itu, kata Yusri, polisi juga akan menggelar Operasi Yustisi di kampung tangguh untuk memastikan masyarakat dapat mematuhi protokol kesehatan menggunakan masker,

mencuci tangan dan menjaga jarak.

"Nanti petugas cek melaksanakan 3T ya, tracing, testing, treatment. Ini yang akan kita lakukan, tapi secara masif. Kapolda akan langsung bekerja di lapangan, ke Polsek Polsek langsung, mana wilayah yang masuk zona merah Covid-19," katanya.

Sebagai informasi, pada Rabu (6/1), Pemerintah Pusat memutuskan akan melaksanakan pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat di Jawa dan Bali mulai 11-25 Januari 2021.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pembatasan tersebut diberlakukan untuk meminimalisir penularan Covid-19 yang kini semakin masif. Secara garis besar, pembatasan tersebut mengatur sejumlah kegiatan diantaranya perkantoran, pembelajaran di sekolah, operasional pusat perbelanjaan, seni budaya hingga peribadatan. Pembatasan tersebut sudah dilengkapi dengan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB.

Polres Jaksel

Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Budi Sartono mengatakan, pihaknya telah membentuk 10 Kampung Tangguh di wilayah Jakarta Selatan.

"Berdasarkan petunjuk bapak Kapolda bahwa pembentukan Kampung Tangguh ini berdasarkan tingkat tingginya terkonfirmasi positif di RW tersebut," ujar kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Budi Sartono di Pasar Minggu, Selasa (8/12) siang.

Menurutnya, tugas Kampung Tangguh adalah memastikan adanya penurunan angka positif Covid-19 di setiap RW. Setiap Kampung Tangguh memiliki tugas 3T, yaitu Tracing, Testing, Treatment di setiap RW. Petugas juga akan memantau perkembangan setiap pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19 jika sedang melakukan isolasi mandiri.

"Kita berharap Kapolda ketika datang satu bulan lagi dilihat turun atau tidak (angka positif Covid-19 di RW yang

berstatus merah)," kata Budi.

Anggota kepolisian nantinya akan melakukan tracing dengan rapid test. Penelusuran juga akan dilakukan kepada orang yang diduga positif Covid-19.

"Setelah itu baru di-treatment, diberi vitamin makanan obat. Makanya disini ada dapur umum. Kalo terkonfirmasi positif di isolasi ga boleh ke mana-mana, terus masyarakat (di dapur umum) inilah yang kasih makan, memberikan vitamin, itu treatment namanya," tambah Budi.

Di setiap Kampung Tangguh juga memiliki ruangan isolasi untuk pasien Covid-19. Ruang isolasi digunakan jika pasien positif Covid-19 tinggal di rumah yang memiliki banyak anggota keluarga.

"Kalau di rumah sendirian ya sendiri aja ga masalah. Tetapi kalo di rumahnya itu dia banyak orang, ya tinggal di isolasi (tinggal di ruang isolasi Kampung Tangguh). Kalau lebih dari (kapasitas ruang isolasi Kampung Tangguh) itu kami kirim ke Wisma Atlet atau RS lainnya," ujar Budi. • Ius



IDN/ANTARA

KASUS PEREDARAN NARKOBA

Polisi menunjukkan sejumlah tersangka saat untkap kasus peredaran narkoba di Polda Jawa Timur, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (8/1). Ditresnarkoba Polda Jawa Timur bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Tanjung Perak menangkap empat tersangka atas kasus dugaan mengedarkan narkoba dan mengamankan sejumlah barang bukti salah satu diantaranya sabu seberat enam kilogram.

Polri akan Terima Hasil Temuan Komnas HAM soal Penembakan Laskar FPI

JAKARTA (IM) - Bareskrim Polri menyatakan akan menerima hasil temuan dari penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), terkait kasus penembakan terhadap 6 anggota Laskar FPI di Tol Jakarta-Cikampek, beberapa waktu lalu.

Kendati begitu, Polri tetap menunggu Komnas HAM apakah akan memberikan hasil penyelidikan dan investigasi kepada pihak Kepolisian.

"Kalau dibawa ke Mabes, ya kami terima dong," kata Dir Tipidum Bareskrim Polri, Brigjen Andi Rian Djajadi saat dihubungi, Jumat (8/1).

Kendati begitu, Andi masih belum bisa berkomentar lebih lanjut terkait dengan hasil temuan Komnas HAM terhadap insiden tersebut.

"Tunggu saja dulu rilis Komnas," ucap Andi.

Komisiner Komnas HAM Choirul Anam sebelumnya mengatakan, telah memeriksa ribuan video untuk mengungkap fakta atas penembakan 6 anggota Laskar FPI.

"Tim Penyelidikan Komnas HAM, saat ini sedang dalam tahap finalisasi laporan peristiwa kematian enam Las-

kar Khusus FPI. Salah satu bagian dari finalisasi laporan tersebut adalah memastikan kembali sejumlah video dan foto screen capture yang telah diperoleh dari beberapa pihak dan saat proses permintaan keterangan saksi," kata Choirul Anam dalam ketetangannya, Kamis (7/1).

Anam mengungkapkan bahwa pihaknya telah memeriksa lebih dari 8.000 video terkait dengan peristiwa baku tembak di Tol Jakarta-Cikampek KM 50 itu.

"8000 lebih video dan ribuan screen capture mewakili beberapa titik, seluruhnya sedang diamati kembali dan pendalaman oleh para Penyelidik Komnas HAM," ujarnya.

Di hubungi terpisah, Komisiner Komnas HAM, Brka Ulung Hapsara menyebut tahapan penyusunan laporan telah berada di angka 80 persen. Akan tetapi, untuk waktu jelas dari pengummsn ke publik belum ditentukan.

"Belum ada rencana itu (pengumuman). Masih didiskusikan antar komisiner terkait jadwal rilis laporan lengkapnya ke publik. Prosesnya sudah sekitar 80 persen," ungkap Beka. • Ius

BNN Sita 15,22 Kg Ganja dan 248 Butir Ekstasi dari Kampung Ambon

JAKARTA (IM) - Badan Narkotika Nasional (BNN) menangkap kasus narkoba di Kampung Ambon, Jakarta Barat pada 20 Desember 2020 lalu.

Petugas BNN menyita 15,22 kg ganja dan 248 butir pil ekstasi.

Kepala BNN, Komjen

Petrus Reinhard Golose menyampaikan bahwa dalam kasus Kampung Ambon ini, BNN menangkap 5 orang pelaku atas inisial T, OC, UP, MS, dan MG.

Dari kelima orang pelaku tersebut, satu diantaranya merupakan seorang perempuan.

"Barang bukti yang disita berupa 15,22 kilogram ganja, 5,8 kilogram sabu, 248 butir ekstasi."

Kata Petrus saat merilis merilis pengungkapan jaringan Kampung Ambon, di Kantor BNN, Jakarta Timur, Jumat (8/1). Selain menyita barang

bukti narkoba.

BNN juga menyita aset milik bandar narkoba bernilai MG senilai 25, 52 miliar rupiah.

Menurutnya, angka ini terbilang cukup fantastis.

Menindaklanjuti sejumlah aset yang dimiliki gembong narkoba tersebut.

BNN juga membuka peluang untuk melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana lainnya.

"Dan sementara juga dilakukan penyidikan berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang," ujar mantan Kapolda Bali tersebut. • Ius

Kompolnas Rekomendasikan Lebih dari 1 Nama Calon Kapolri ke Presiden

JAKARTA (IM) - Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) telah menyerahkan nama calon Kapolri pengganti Jenderal Idham Azis, kepada Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Ketua Harian Kompolnas Irjen (Purn) Benny Mamoto, rekomendasi nama calon Kapolri itu diserahkan pada Rabu (6/1) kemarin, setelah dilakukannya rapat pleno.

"Sudah diserahkan Rabu sore, setelah selesai rapat pleno dipimpin Ketua Kompolnas," kata Benny di Jakarta, Jumat (8/1).

Kendati begitu, Kompolnas tidak bisa membeberkan

nama-nama Komjen polisi yang diserahkan kepada Presiden Jokowi. Namun dipastikan bahwa yang direkomendasikan Kompolnas lebih dari satu nama.

Nama-nama calon Kapolri itu langsung diserahkan Ketua Kompolnas sekaligus Menko Polhukam Mahfud MD.

"Betul (lebih dari satu nama yang direkomendasikan)," kata Benny.

Menurut Benny, Kompolnas belum bisa mengungkap siapa saja nama-nama yang masuk dalam rekomendasi lembaga tersebut.

"Untuk nama tidak dipublikasikan karena suratnya bersifat

rahasia," ujar Benny.

Kapolri Jenderal Idham Azis akan memasuki masa pensiun pada 1 Februari mendatang. Sosok penggantinya ramai dibahas sehingga menjadi isu yang hangat dibicarakan.

Sidang III DPR

Hingga saat ini DPR belum menerima surat Presiden (Surpres) terkait pencalonan Kapolri, lantaran masih reses. Namun, DPR akan langsung tancap gas sesuai masa sidang III tahun 2020-2021 dibuka, pada 11 Januari pekan depan.

Hal ini disampaikan Wakil

Ketua DPR RI Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) Azis Syamsuddin. Menurutnya, pihaknya segera membahas calon Kapolri pengganti Jenderal Idham Azis yang tak lama lagi pensiun.

"Ya (akan langsung rapat Bamus/Badan Musyawarah)," kata Azis saat dihubungi MNC Portal Indonesia, di Jakarta, Jumat (8/1).

Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini mengatakan, pihaknya sampai saat ini belum menerima surat resmi dari Presiden perihal usulan calon Kapolri. Jadi, dirinya belum bisa berkomentar

perihal nama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Boy Rafli Amar yang dikabarkan menjadi pilihan Jokowi.

"Belum ada suratnya," ujar politikus Partai Golkar itu.

Sebelumnya diberitakan, ada 4 nama jenderal bintang 3 sebagai calon kuat Kapolri pengganti Jenderal Pol Idham Azis, mereka yakni, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar, Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono, Kabaharkam Komjen Pol Agus Andrianto dan Kabareskrim Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo. • Ius



IDN/ANTARA

RAZIA YUSTISI SKALA BESAR DI BOYOLALI

Petugas gabungan memberhentikan pengendara motor yang tidak menggunakan masker saat melakukan razia yustisi skala besar di Jalan Boyolali-Solo, Boyolali, Jawa Tengah, Jumat (8/1). Razia yustisi skala besar yang dilakukan oleh tim gabungan TNI, Polri dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali tersebut untuk menindak tegas warga yang tidak menggunakan masker dan agar tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan di luar rumah menjelang pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat Jawa-Bali pada 11-25 Januari 2021.

國際日報
Guo Ji Ri Bao - Medan

Lowongan Kerja 职位空缺

MARKETING FREELANCE

Syarat :

- Di Utamakan Bisa berbahasa mandarin lisan dan tulisan
- Penampilan Menarik dan Rapi
- Orientasi Target dan Komisi
- Minimal Lulusan SMA / Sederajat
- Berpengalaman di bidang Marketing
- Domisili Medan - Sumatera Utara

Lamaran dikirim Via Email :
w.pandjaitan1@gmail.com